

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Bagus Aji Pangestu
NPP. 30.0525

*Asdaf Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
Program Studi Keuangan Publik
Email: bagusajip00@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Eko Budi Lestari, SE, MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Financial reporting with renewable innovations through SIPD to produce effective and transparent reports. The application of the use of SIPD has not been very effective considering the existence of several obstacles ranging from adjustment of use to authority in the use of finance. **Purpose:** This study aims to determine the effectiveness in financial management through the Local Government Information System as a program of the Ministry of Home Affairs at BKAD Bandung City in realizing good governance, inhibiting factors along with efforts that can be made to create effectiveness in financial management at BKAD Bandung City. **Method:** With an inductive approach as the method used in this study with researchers as research instruments. Data collection through interviews, observations, and documentation is then analyzed. **Result:** There are obstacles to requesting access and applications that are not yet stable so that they require updating and simplification in inputting financial management data. With the improvement of facilities and policies to facilitate access to SIPD for implementers, suggestions to increase effectiveness in the use of SIPD. **Conclusion:** In the implementation of SIPD in Bandung City, which has only been implemented for two years since 2020, as a start to implement governance, including finance, with the principle of accountability. Communication becomes the main thing by implementing the principles of good governance for coordination in the use of SIPD. This is both towards a digital-based government and shows performance in transparent financial management through LAKIP which can be downloaded at SIPD

Keywords: Effectiveness; Financing; SIPD; BKAD Bandung City

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaporan keuangan dengan inovasi terbaru melalui SIPD untuk menghasilkan laporan yang efektif dan transparan. Penerapan dari penggunaan SIPD belum terlalu efektif meninjau adanya beberapa kendala mulai dari penyesuaian penggunaan hingga otoritas dalam penggunaan keuangan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dalam pengelolaan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah sebagai program dari Kementerian Dalam Negeri di BKAD Kota Bandung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, faktor penghambat beserta upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan efektivitas

dalam pengelolaan keuangan di BKAD Kota Bandung. **Metode:** Dengan pendekatan induktif sebagai metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan peneliti sebagai instrument penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis. **Hasil/Temuan:** Adapun hambatan untuk meminta akses serta aplikasi yang belum stabil sehingga membutuhkan pembaharuan dan simplifikasi dalam penginputan data kelola keuangan. Dengan pembaharuan fasilitas dan kebijakan untuk memudahkan akses SIPD bagi pelaksana adalah saran untuk meingkatkan efektivitas dalam penggunaan SIPD. **Kesimpulan:** Dalam pelaksanaan SIPD di Kota Bandung yang baru dilaksanakan dua tahun sejak 2020 sebagai awal mula untuk melaksankan tata kelola pemerintahan termasuk keuangan dengan prinsip akuntabilitas. Komunikasi menjadi hal yang utama dengan menerapkna asas good governance untuk koordinasi dalam penggunaan SIPD. Hal ini baik dalam menuju pemerintahan yang berbasis digital serta menunjukkan kinerja dalam pengelolaan keuangan secara transparan melalui LAKIP yang dapat diunduh di SIPD

Kata kunci: Efektivitas; Keuangan; SIPD; BKAD Kota Bandung

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata kelola pelaksanaan pengelolaan keuangan di Indonesia ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang dan harus dapat mengelola pelaksanaan keuangannya yang dimulai dari tahapan perencanaan hingga akhirnya pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Pada Pasal 1 dijelaskan lebih rinci bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang terdiri atas beberapa tahapan yaitu perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawab serta pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dari beberapa tahapan yang terhimpun dalam proses pengelolaan keuangan daerah tersebut, tahapan pengelolaan keuangan menjadi salah satu tahapan yang krusial dan penting untuk dilaksanakan dengan optimal.

Dalam rangka memberikan gambaran terkait contoh pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam APBD sekaligus mempersempit lingkup bahsan pada penelitian ini maka Penulis akan membahas struktur APBD dari Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Penjabaran keuangan pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada tabel diatas merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Selain tahapan pengelolaan keuangan dalam tata kelola keuangan daerah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terkhusus pada Pasal 214 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib untuk mengolah dan menyediakan informasi keuangan daerah kepada publik. Adapun beberapa tujuan dari informasi keuangan daerah adalah: a) membantu Kepala Daerah dalam menJrusun keuangan daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah; b) membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah; c) membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah; d) menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah; e) mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; f) mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; g) melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa informasi keuangan daerah harus tersedia dan dilaporkan kepada Menteri yang mengurus bidang keuangan. Berkaitan dengan informasi keuangan daerah,

Pemerintah telah berinovasi melalui Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri telah menciptakan suatu sistem dalam tata pelaksanaan pemerintahan daerah. Pelaksanaan SIPD sendiri diatur secara lengkap melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 disebutkan bahwa ruang lingkup dari SIPD setidaknya terdiri atas 3 aspek yaitu sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya. Salah satu aspek yang terdapat dalam Sistem informasi keuangan daerah yang termasuk dalam lingkup dari SIPD adalah pada tahapan perencanaan keuangan daerah yang dapat dihasilkan dari tahapan dalam penyusunan perencanaan keuangan daerah yang sudah dilaksanakan dengan berbasis elektronik.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam rangka memberikan gambaran terkait contoh pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam APBD sekaligus mempersempit lingkup bahasan pada penelitian ini maka Penulis akan membahas struktur APBD dari Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Penjabaran keuangan pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada tabel diatas merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Selain tahapan pengelolaan keuangan dalam tata kelola keuangan daerah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terkhusus pada Pasal 214 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib untuk mengolah dan menyediakan informasi keuangan daerah kepada publik. Adapun beberapa tujuan dari informasi keuangan daerah adalah: a) membantu Kepala Daerah dalam menJrusun keuangan daerah dan laporan Pengelolaan Keuangan Daerah; b) membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan Daerah; c) membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah; d) menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah; e) mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat; f) mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah; g) melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa informasi keuangan daerah harus tersedia dan dilaporkan kepada Menteri yang mengurus bidang keuangan. Berkaitan dengan informasi keuangan daerah, Pemerintah telah berinovasi melalui Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri telah menciptakan suatu sistem dalam tata pelaksanaan pemerintahan daerah. Pelaksanaan SIPD sendiri diatur secara lengkap melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 disebutkan bahwa ruang lingkup dari SIPD setidaknya terdiri atas 3 aspek yaitu sistem informasi pembangunan daerah, sistem informasi keuangan daerah, dan sistem informasi pemerintahan daerah lainnya. Salah satu aspek yang terdapat dalam Sistem informasi keuangan daerah yang termasuk dalam lingkup dari SIPD adalah pada tahapan perencanaan keuangan daerah yang dapat dihasilkan dari tahapan dalam penyusunan perencanaan keuangan daerah yang sudah dilaksanakan dengan berbasis elektronik.

Sekalipun Pemerintah telah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengelola data dan informasi melalui SIPD dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui pembentukan tim pengelola namun Penulis merasa tertarik untuk mendalami terkait dengan teknis penggunaan dan sudah sejauhmana pemanfaatan SIPD terhadap pengelolaan keuangan daerah dijalankan, terkhusus pada bagian pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Kota Bandung. Seiring dengan penerapan SIPD tersebut maka mewajibkan pengelolaan keuangan keuangan daerah di Kota Bandung dilaksanakan melalui SIPD. Namun berkaitan dengan bagaimana penggunaan dan implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan keuangan daerah di Kota Bandung masih relatif minim dan manfaat dari

penerapan SIPD di Kota Bandung sampai saat ini cenderung belum diketahui dilapangan. Maka dari itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dikelola melalui SIPD yang diharapkan dengan mengetahui sejauh mana tingkat efektifitas dari sistem informasi (SIPD) yang digunakan dalam tata kelola keuangan daerah di Kota Bandung maka dapat memberikan masukan dan saran bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung dan juga Pemerintah Pusat yang mengelola SIPD untuk dapat semakin mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan SIPD

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari beberapa peneliti yang memiliki sebagian kesamaan dalam variabel penelitian sebagai bentuk pengembangan dari penelitian ini. BPKAD Kota Medan serupa juga telah menerapkan penggunaan SIPD terutama dalam mengeksekusi program pemerintah baik dari sistem dalam perencanaan, sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan lainnya (Nasution, & Nurwani, 2021). Sebagaimana juga yang dijabarkan dari penelitian oleh Ekaputra (2021) mengenai penggunaan SIPD dalam penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk, yang menjadi temuan adalah penyusunan Dokumen RKPD masih kurang efektif apabila dilihat dari RKPD yang dihasilkan hingga upaya yang dapat dilakukan yakni melaporkan permasalahan terkait sulitnya mengakses aplikasi SIPD kepada pemerintah pusat untuk dapat segera ditindak lanjuti. SIPD yang diterapkan di BPKAD Kota Pekanbaru ditinjau belum efektif terutama dalam hal komunikasi yakni sejalanannya antara pemerintah pusat dan daerah yang belum sinkronisasi (Vitrian Agustian & Ahyaruddin, 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang terfokus pada penggunaan anggaran untuk evaluasi anggaran pada tahun berikutnya dengan lokasi penelitian di BKAD Kota Bandung.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh intepretasi efektivitas pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPD di Kota Bandung sehingga dapata dianalisis hambatan untuk ditemukan upaya pengelolaan keuangan daerah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif terkait dalam meneliti dan memproses data-data yang berupa kata dan gambar untuk ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data untuk menjawab rumusan masalah peneliti yang bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpul diproses dengan teknik triangulasi data. Data yang telah diolah yang diverifikasi untuk dapat ditemukan kesimpulan dengan kredibilitas yang akurat (Miles & Huberman, 2017)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPD di Kota Bandung khususnya di BKAD Kota Bandung sebagai instansi yang mengelola keuangan dan aset daerah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yakni tahap perencanaan keuangan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Menggunakan SIPD di Kota Bandung

Pelaksanaan SIPD sendiri telah berjalan semenjak 2020 ketika sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik termasuk informasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada dasarnya, BKAD Kota Bandung telah memiliki sistem pelaporan keuangan yang disebut sebagai SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Semua giat pengelolaan keuangan menjunjung *good governance* meninjau tahapan akuntansi dan laporan keuangan yang berbasis digital.

Dengan berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum yang diselaraskan dengan asas Desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil konkretnya dari kinerja dan penkeuangan dapat dilihat dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) sehingga masyarakat juga memiliki akses untuk melihat *cashflow* yang dapat diunduh dari SIPD Kota Bandung. Untuk sosialisasi sendiri yang pernah dilakukan pertama kali oleh Kementerian Dalam Negeri pada saat masa pandemic Covid-19 untuk menyeragam kesepahaman melalui koordinasi yang baik dari Kementerian Dalam Negeri pada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia termasuk Kota Bandung. Kerjasama tim sebagai kunci utama pada aspek komunikasi, untuk pemahaman lebih lanjut tentang SIPD dapat didiskusikan melalui grup Whatsapp BKAD Kota Bandung, sehingga segala macam bentuk kendala dapat direkap dan dipecahkan masalahnya bersama. SIPD sebagai aplikasi berbasis online yang tersedia dapat diunduh melalui link yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri. SDM di BKAD Kota Bandung seharusnya dipersiapkan untuk memiliki beberapa kecakapan yang krusial terutama kerjasama dan koordinasi yang baik serta adanya dukungan pimpinan. Pelatihan yang didapat adalah penyusunan RKPD sebagai penghubung dalam penyusunan Kebijakan Umum Keuangan dan Prioritas Plafon Keuangan Sementara. Penggunaan SIPD dalam pengelolaan keuangan terbilang cukup efektif untuk pelaporan dan penyusunan laporan keuangan. Penulis melakukan pengukuran terhadap partisipasi dalam pelaksanaan program *lorong literasi* melalui keterlibatan terhadap pemberian ide, tenaga, dan materi.

3.2. Faktor Penghambat Beserta Upaya dalam Mengatasi untuk Pengelolaan Keuangan Menggunakan SIPD di Kota Bandung

Representasi data dalam SIPD tidak menunjukkan data yang sebenarnya. Hasilnya diinterpretasikan tanpa memperhitungkan angka desimal sementara, yang didasarkan pada meringkas data input dengan pertimbangan tempat desimal. Oleh karena itu, penting agar input dan output sama untuk menghasilkan ekonomi yang seimbang.

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD di BKAD Kota Bandung adalah menyederhankan proses permintaan akun administrator untuk melakukan perubahan objek, pembaharuan termutakhir secara berkala dari SIPD sehingga tidak mengalami kendala dalam proses penginputan, dan meningkatkan server jaringan yang baik meninjau SIPD membutuhkan koneksi internet yang cepat.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan SIPD di BKAD Kota Bandung sepatutnya memberikan dampak yang positif jika segala kebutuhan yang menyangkiut pelaksanaan SIPD terpenuhi. Hal ini ditinjau dari misi Pemerintahan Indonesia dalam mewujudkan *good governance* yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Penulis menemukan bahwasanya SDM sebagai prioritas utama untuk menjalankan program buatan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. SDM memang diharuskan memiliki kapabilitas baik dari kecakapan yang melengkapi latar belakang pendidikan masing-masing. Dalam penelitian yang dilkauan oleh Nasution dan Nurwani (2011) dalam kajian mengenai penerapan SIPD di BPKAD Kota Medan tetapi yang menjadi perbedaan penelitian ini adalah bahwasanya lebih memfokuskan pada laporan keuangan sebagai giat awal dalam memulai penganggaran. Untuk karakteristik dari SIPD terkait pelaksanaanny ayang mencakup berbagai modul dan fitur, termasuk anggaran, pengeluaran, penerimaan, inventaris, pelaporan keuangan, dan pemantauan *real-time*. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan transparansi, dna memungkinkan pemantauan yang lebih efektif terhadap penggunaan anggaran publik. Penelitian yang dilakukan oleh Ekaputra (2021) mendukung ap ayang menjadi temuan dalam penelitian yaitu kualitas RKPD yang sebagian dari laporan keuangan dipengaruhi dari lingkungan internal yaitu BKAD sendiri yang ditegaskan dengan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan SIPD di Kapupaten Nganjuk. Selain itu pentingnya edukasi bagi pelaksana SIPD di Kota Bandung melalui sosialisasi meninjau hal ini masih baru dan sedang proses adaptasi terutama memasuki masa baru dari pandemic Covid-19.

IV. KESIMPULAN (5-10%)

Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) dimulai pada tahun 2020 setelah sosialisasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di Kota Bandung, Badan Keuangan Daerah (BKAD) telah memiliki sistem pelaporan keuangan bernama SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Sistem ini berbasis digital dan menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam tahapan akuntansi dan laporan keuangan.

Pelaksanaan SIPD didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selaras dengan asas desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil kinerja dan keuangan yang konkret dapat dilihat melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang dapat diakses oleh masyarakat melalui SIPD Kota Bandung.

Sosialisasi SIPD pertama kali dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri pada masa pandemi COVID-19 untuk memastikan pemahaman yang seragam dan koordinasi yang baik antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kota Bandung. Kerjasama tim dan komunikasi yang baik menjadi kunci penting dalam sosialisasi ini. Diskusi dan pemecahan masalah terkait SIPD dapat dilakukan melalui grup WhatsApp BKAD Kota Bandung. Aplikasi SIPD berbasis online dapat diunduh melalui link yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pihak BKAD Kota Bandung mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dengan keterampilan yang penting, seperti kerjasama, koordinasi, dan dukungan dari pimpinan. Pelatihan yang diberikan termasuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penghubung dalam penyusunan Kebijakan Umum Keuangan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Penggunaan

SIPD dalam pengelolaan keuangan terbukti efektif untuk pelaporan dan penyusunan laporan keuangan.

Selain itu, penulis melakukan pengukuran terhadap partisipasi dalam pelaksanaan program lorong literasi melalui kontribusi ide, tenaga, dan materi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni keterbatasan akses untuk meninjau langsung situs administrator SIPD meninjau harus melalui perizinan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan memperoleh akses SIPD untuk mengetahui secara langsung penginputan laporan keuangan

v. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Eko Budi Lestari, SE, MM. yang senantiasa membimbing penulis dalam penelitian ini.

vi. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar* (3rd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Burhan, B. (2014). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi*, 21(1), 62–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.32503/otonomi.v21i1.1606>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah (Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Damayanti, T. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (2nd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Herdiansyah, H. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Munanika.
- Hutahaean, J. (2018). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Komariah, A., & Satori, D. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Kuantitatif dan Kualitatif (Disertai Contoh Praktis)* (2nd ed.). Prenada Media Group.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marimin, M., Tanjung, H., & Prabowo, H. (2006). *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Moleong, L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morrisan, A. M. (2017). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nafarin, M. (2007). *Pengelolaan keuangan Perusahaan* (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akutansi Dan Keuangan*, 9(2), 109–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. bogor: Ghalia Indonesia.
- Raharja, A. D. B. (2022). *Sistem Informasi: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Komponen dan 6 Contohnya*.
- Renyowijoyo, M. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Riyanto, A. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Sanjaya, W. (2011). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sholeh, C., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan*

- Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Bandung: Fokusmedia.
- Siagian, S. P. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia (1st ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, B. (2015). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua) (Pertama). Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Steers, R. M. (1985). Managing Effective Organizations. Kent Publishing.
- Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, R. A. (2002). Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen untuk Teknologi Maju dan Globalisasi (2nd ed.). Yogyakarta: BPF.
- Sutarman. (2012). Buku Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutisna, I. D., Dwiputrianti, S., & Rahman, A. (2022). Model Implementasi Penyusunan Keuangan Belanja Pada Sistem Infrmasi Pemerintahan Daerah di Kota Bandung. *Journal of Regional Public Administration*, 7(1), 28–40.
- Vitrian, N., AgustiaWAN, & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64–77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>
- Yusuf, M. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan. Jakarta: Prenada Media Group.

